



**H. BAMBANG PUDJIONO, SH.
BUPATI GROBOGAN**



**H. ICEK BASKORO, SH, MH.
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2015
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Muatan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :

- A. Urusan Desentralisasi;
- B. Tugas Pembantuan; dan
- C. Tugas Umum Pemerintahan.

Penyusunan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2015, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan atau saran itu disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 bulan setelah ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten yang memiliki wilayah terluas ke-2 se-Provinsi Jawa Tengah, dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Purwodadi. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015 tercatat sebesar 1.431.535 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 1,36% atau bertambah 19.210 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2014.

Dari aspek Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 725 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.706 jiwa/km² dan kecamatan kepadatan terendah di Kecamatan Geyer yaitu sebesar 350 jiwa/km².

Dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 708.124 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 704.984 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Sementara ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan usia, rasio ketergantungan penduduk sebesar 43%, artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung 43 jiwa penduduk yang non produktif, angka ketergantungan sebesar 43% ini masuk dalam kategori **ketergantungan rendah**.

Adapun persentase penduduk miskin selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 17,36% pada tahun 2011 dan berurutan mengalami penurunan 16,13% pada tahun 2012, 14,87% pada tahun 2013, dan pada akhir tahun 2014 sebesar 13,86%.

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan penduduk, tertinggi pada tamatan SD atau sederajat sebanyak 44%, kemudian secara berurutan diikuti oleh tidak atau belum tamat SD sebanyak 29%, tamat SLTP atau sederajat 16%, tamat SLTA atau sederajat 9%, dan terakhir tamat Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2%.

Selanjutnya dari Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Grobogan selama empat tahun terakhir masuk pada kelas pembangunan manusia kategori SEDANG dan selalu mengalami kenaikan, mulai dari 65,41 pada tahun 2011 dan 67,77 pada akhir tahun 2014.

3. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami pertumbuhan, terakhir diperkirakan

mencapai angka pertumbuhan 4,03%. Adapun untuk PDRB Perkapita dengan menggunakan Perhitungan Tahun Dasar 2010 kondisinya terus mengalami kenaikan. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp. 13.515.913,- atau naik sebesar 8,66% dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada aspek pemerataan pendapatan, dapat dilihat melalui indikator Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan yang Dinikmati Oleh Kelompok 40% Penduduk yang Berpendapatan Terendah. Berdasarkan kedua indikator tersebut, pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan masih berada pada kategori **ketimpangan rendah**. Hal ini dilihat dari :

Pertama, bahwa indikator Gini Ratio akhir tahun 2014 sebesar 0,34 masih dibawah batas ketimpangan sebesar 0,35. *Kedua*, bahwa berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah yang menikmati pendapatan total kabupaten pada tahun 2014 sebesar 21,34%, dan selalu di atas 17% selama empat tahun berturut-turut.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera"**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka disusunlah misi daerah sebagai rumusan umum tindakan konkret yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.

3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

B. PRIORITAS DAERAH

Sesuai visi misi tersebut, maka setiap tahun ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rancangan kerja dan pendanaannya.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2016), pembangunan Kabupaten Grobogan dibagi menjadi dua tahap pembangunan, yakni tahap kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik (2011-2013), dan tahap peningkatan perwujudan masyarakat Grobogan yang sejahtera lahir dan batin (2014-2016).

Berpedoman pada tahapan tersebut di atas, maka RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 termasuk dalam tahap pembangunan kedua (2014-2016), sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 adalah prioritas pembangunan tahap perwujudan masyarakat Grobogan yang sejahtera lahir dan batin. Pembangunan pada tahap kedua lebih menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat Grobogan dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015, prioritas pembangunan tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
7. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.
8. Peningkatan kesadaran hukum.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas.

III. KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan secara teknis, penyusunan APBD didasarkan pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan anggaran APBD Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan prinsip Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin, Transparansi, serta Akuntabilitas. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.

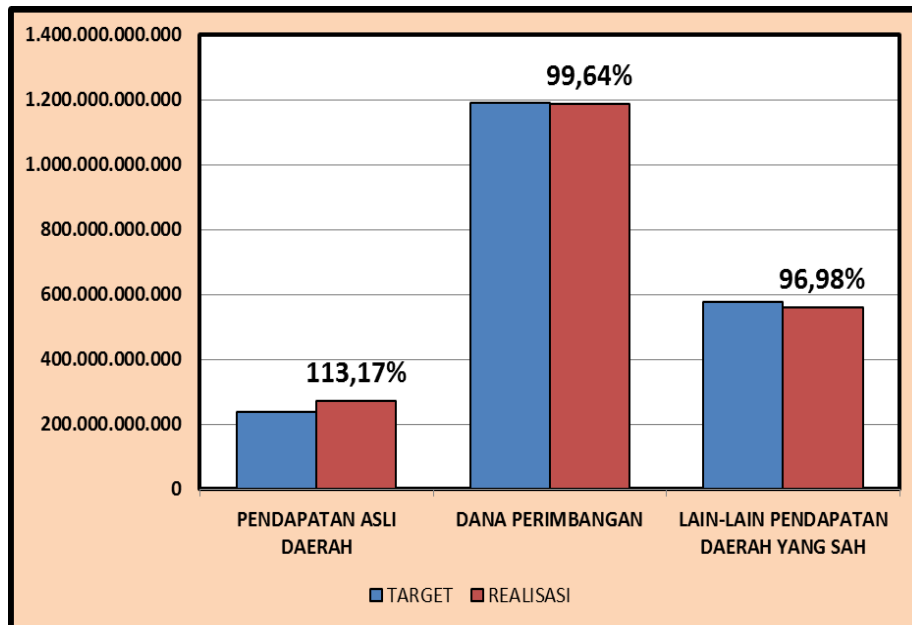
Selanjutnya, secara ringkas disampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun perlu diketahui bahwa angka realisasi APBD yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.006.226.129.000,- terealisasi Rp.2.016.156.498.149,- atau 100,49%, dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.239.705.289.000,- terealisasi Rp. 271.286.002.568,- atau 113,17%, target Dana Perimbangan sebesar Rp.1.190.468.933.000,- terealisasi

Rp.1.186.214.542.310,- atau 99,64%, dan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.576.051.907.000,- terealisasi Rp.558.655.953.271,- atau 96,98%.

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 1
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015

Adapun secara rinci target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, adalah sebagaimana tabel berikut:

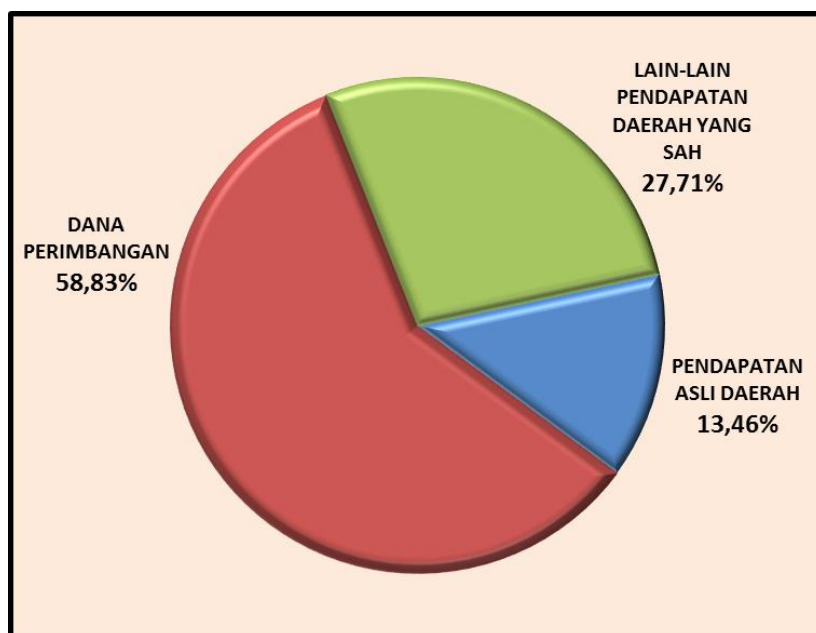
Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN	2.006.226.129.000	2.016.156.498.149	100,49
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	239.705.289.000	271.286.002.568	113,17
1	Pendapatan Pajak Daerah	44.561.750.000	52.744.929.083	118,36
2	Pendapatan Retribusi Daerah	30.269.406.000	25.115.389,634	82,97
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.966.137.000	10.241.201.300	93,39
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.907.996.000	183.184.482.551	119,02
B	DANA PERIMBANGAN	1.190.468.933.000	1.186.214.542.310	99,64
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan	50.321.483.000	46.067.092.310	91,55

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Pajak			
2	Dana Alokasi Umum	1.008.901.500.000	1.008.901.500.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	131.245.950.000	131.245.950.000	100,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	576.051.907.000	558.655.953.271	96,98
1	Pendapatan Hibah	14.830.733.000	9.967.401.080	67,21
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	136.656.086.000	128.708.982.460	94,18
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	378.478.042.000	378.478.042.000	100,00
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.087.046.000	41.501.527.731	90,05

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum diaudit BPK)

Komposisi Sumbangan terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan sebesar 58,83% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 27,71% dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,46%. Komposisi penyumbang pendapatan Daerah ini, lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

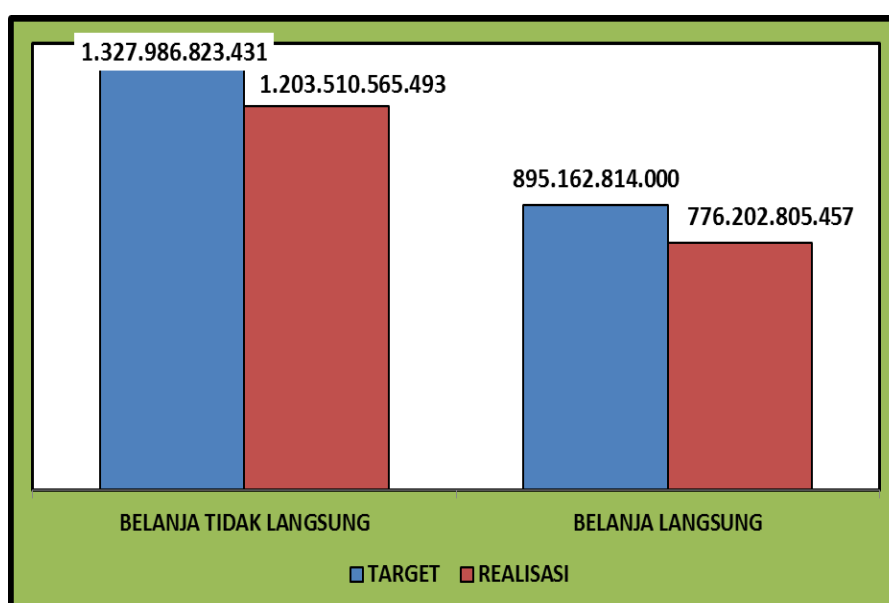


Gambar 2
Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah Tahun 2015

B. BELANJA DAERAH

Secara keseluruhan target belanja Kabupaten Grobogan tahun 2015 sebesar Rp.2.223.149.637.431,- terealisasi Rp.1.979.713.370.950,- atau 89,05%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.327.986.823.431,- terealisasi Rp.1.203.510.565.493,- atau 90,63% dan target Belanja Langsung sebesar Rp.895.162.814.000,- terealisasi Rp.776.202.805.457,- atau 86,71%.

Serapan Belanja Daerah dimaksud dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 3
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2015

Adapun secara rinci target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015, adalah sebagaimana tabel berikut:

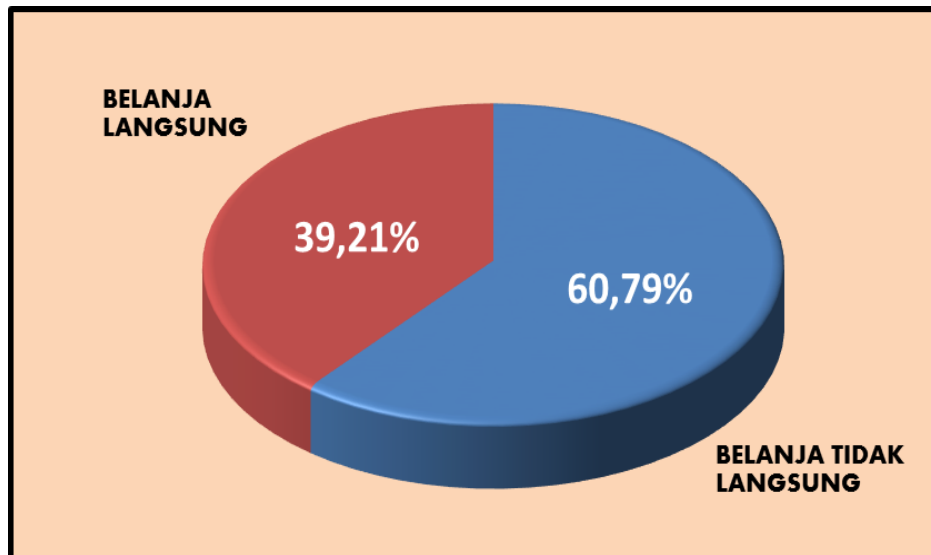
Tabel 2
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	2.223.149.637.431	1.979.713.370.950	89,05
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.327.986.823.431	1.203.510.565.493	90,63
1	Belanja Pegawai	1.012.734.728.000	901.987.729.215	89,06
2	Belanja Bunga	47.179.000	13.856.282	29,37
3	Belanja Subsidi	506.500.000	488.500.000	96,45
4	Belanja Hibah	65.006.799.887	61.321.799.887	94,33
5	Belanja Bantuan Sosial	17.238.906.400	12.710.116.756	73,73

6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	224.817.773.000	221.647.788.565	98,59
7	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.768.359.000	5.100.671.460	88,43
8	Belanja Tidak Terduga	1.866.578.144	240.103.328	12,86
B	BELANJA LANGSUNG	895.162.814.000	776.202.805.457	86,71
1	Belanja Pegawai	56.912.899.800	51.719.214.700	90,87
2	Belanja Barang dan Jasa	492.834.628.525	429.655.613.491	87,18
3	Belanja Modal	345.415.285.675	294.827.977.266	85,35

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan. (angka sementara, belum diaudit BPK)

Sedangkan Komposisi serapan belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 60,79% dan belanja langsung 39,21%, dapat disajikan dalam Gambar sebagai berikut :



Gambar 4
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2015

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp. 231.031.234.931,- atau 99,49% dari target penerimaan sebesar Rp.232.212.404.431,-. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp.12.017.895.600,- atau 78,61% dari target pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.15.288.896.000,-.

Selanjutnya perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2015, terdapat Surplus sebesar Rp.36.443.127.199,- sedangkan pembiayaan

netto sebesar Rp.219.013.339.331,- dengan demikian maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2015 sebesar Rp.255.456.466.530,-.

Realisasi pembiayaan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	PENDAPATAN	2.006.226.129.000	2.016.156.498.149	100,49
2	BELANJA	2.223.149.637.431	1.979.713.370.950	89,05
	Surplus/Defisit	(216.923.508.431)	36.443.127.199	(16,80)
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	232.212.404.431	231.031.234.931	99,49
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.288.896.000	12.017.895.600	78,61
	Pembiayaan Netto	216.923.508.431	219.013.339.331	100,96
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	255.456.466.530	

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum diaudit BPK)

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan pada tahun 2015, Kabupaten Grobogan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, dengan anggaran sebesar Rp. 895.162.814.000,- dan terealisasi 86,71%.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2015, dipaparkan secara singkat sebagai berikut :

A. Penguatan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal

Sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian, sarana dan prasarana jalan memegang peranan yang sangat penting. Dari seluruh jalan kabupaten sepanjang 890,01 km, jalan dengan kondisi baik/mantap mencapai 40,73% atau sepanjang 362,46 km, meningkat 23,41 km dibandingkan tahun lalu. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 7,96% atau 70,88 km, berkurang 8,17 km dibandingkan tahun lalu. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 22,67% atau 201,79 km, berkurang 8,25 km dibandingkan tahun lalu. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak berat

sebesar 28,64% atau 254,86 km, berkurang 6,99 km dibandingkan tahun lalu.

Selain sarana dan prasarana jalan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini ditempuh melalui Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di musim kemarau guna menunjang pertanian, antara lain : rehab saluran sekunder sepanjang 30,90 km, normalisasi avour/sungai sepanjang 116,31 km, pembuatan embung sebanyak 2 paket, pembangunan bendung sebanyak 8 lokasi, serta rehab bendung sebanyak 21 paket.

Pencapaian prioritas pembangunan ini didukung oleh penyelenggaraan Urusan Perhubungan, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian, Urusan Pariwisata dan Urusan Pekerjaan Umum, dengan anggaran sebesar Rp. 277.968.319.287,- terealisasi sebesar 90,56%.

B. Peningkatan Ketrampilan dan Kewirausahaan

Usaha meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan diselenggarakan melalui Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan anggaran sebesar Rp. 8.216.000.000,- terealisasi sebesar 89,03%.

Penyelenggaraan Urusan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan, diantaranya pembinaan dan pelatihan terhadap Industri Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta pameran dalam rangka promosi produk IKM dan UMKM baik pada tingkat lokal, provinsi maupun nasional.

C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian prioritas ini ditempuh melalui penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Otonomi Daerah, Urusan Pertanahan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Kearsipan serta Urusan Perpustakaan, dengan anggaran sebesar Rp. 108.233.879.334,- terealisasi sebesar 90,29%.

Adapun program yang dilaksanakan, diantaranya adalah Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, yang dilakukan melalui kegiatan penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan bidang pelayanan.

Selain itu, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga dilaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang dalam pelaksanaannya telah dilakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan menerapkan Sistem Informasi PATEN atau SIM-PATEN, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi mengenai pelayanan yang dilaksanakan di kecamatan.

Disamping itu, prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan hasil terlaksananya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu, dengan anggaran sebesar Rp. 2.383.754.000,- terserap sebesar 86,16%.

D. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Upaya meningkatkan pemerataan pembangunan ditempuh melalui penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Otonomi Daerah, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Statistik, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral serta Urusan Penataan Ruang, dengan anggaran sebesar Rp. 93.943.807.000,- terealisasi sebesar 89,21%.

Prioritas ini juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui Program Pemberdayaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- terserap sebesar 82,89%, dengan hasil kegiatan berupa pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan di 6 desa pada 6 kecamatan.

E. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diselenggarakan melalui Urusan Kesehatan, yang dialokasikan dalam program dan kegiatan baik yang bersifat umum maupun spesifik dengan total anggaran Rp. 254.889.743.928,- terealisasi sebesar 84,53%.

Adapun program-program yang dilaksanakan, diantaranya adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin serta Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dalam bentuk Tugas Pembantuan, berupa Program Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak, dengan anggaran sebesar Rp. 3.726.723.000,- terserap sebesar 96,21%.

Selain belanja langsung dan tugas pembantuan tersebut, juga dialokasikan anggaran melalui belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk keperluan dukungan di bidang kesehatan, antara lain untuk Bantuan kepada PMI Cabang Grobogan dan Bantuan Sosial Kepada Individu untuk Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.810.404.075,-.

F. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kesetiakawanan Sosial

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban antar umat beragama dibutuhkan toleransi yang baik. Toleransi tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap saling pengertian dan menghargai, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan rukun dan penuh kedamaian tanpa diskriminasi.

Pencapaian prioritas ini didukung melalui penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Sosial serta Urusan Kebudayaan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.626.745.000,- terealisasi sebesar 62,31%.

Di samping itu, untuk mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial, telah dialokasikan anggaran dalam belanja tak langsung yang dipergunakan untuk Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat Bidang Keagamaan serta Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.575.000.000,-.

G. Peningkatan Program Pro Rakyat (Penanggulangan Kemiskinan) dan Program Keadilan Untuk Semua

Pencapaian prioritas ini didukung melalui penyelenggaraan Urusan Pendidikan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Perumahan, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Transmigrasi, Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan anggaran sebesar Rp. 107.316.543.651,- terealisasi sebesar 75,40%.

Di samping itu, untuk mendukung prioritas program pro rakyat, juga ditunjang dengan belanja tak langsung, antara lain berupa Bantuan Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Bantuan Tunjangan Fungsional Guru Non PNS, Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan PAMSIMAS, Bantuan Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin serta Bantuan Sosial kepada Transmigran, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 263.098.007.478,-.

H. Peningkatan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan manusia sebagai pelaku utamanya, karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk moral, mental dan intelektualitasnya perlu dikembangkan disamping sistem dan pranata perundangannya.

Pencapaian prioritas peningkatan kesadaran hukum, ditempuh melalui penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yang tertampung dalam program dan kegiatan, baik yang bersifat umum maupun spesifik dengan total anggaran Rp. 7.453.770.500,- dan terealisasi 88,39%.

Adapun program yang dilaksanakan, diantaranya adalah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, serta Sosialisasi mengenai Hak Asasi Manusia.

I. Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi dan Berpolitik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan setiap tahun melaksanakan Program Pendidikan Politik Masyarakat. Pada tahun 2015 pelaksanaan program ini difokuskan pada beberapa kegiatan, diantaranya Peningkatan Budaya Politik bagi Parpol dan Ormas Wanita, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik bagi Parpol serta DESK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015.

Upaya meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik didukung melalui penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta Urusan Otonomi Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.2.211.810.000,- terealisasi sebesar 90,35%.

Di samping itu, untuk mendukung prioritas peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik, dalam belanja tak langsung juga telah dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 896.228.580,-.

Perlu saya sampaikan, berdasarkan data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 yang baru lalu sebesar 65,88%, atau 702.559 warga yang menggunakan hak pilihnya dari total 1.066.436 Daftar Pemilih Tetap. Bila dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan sebelumnya pada tahun 2011, angka ini menurun 1,77%. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat menurun dibanding Pemilu sebelumnya, namun secara umum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015 dapat berjalan secara tertib, aman dan lancar.

J. Perintisan dan Pengembangan Industri dan Perdagangan yang Terkait Dengan Pertanian Dalam Arti Luas

Upaya untuk mencapai prioritas pembangunan ini dapat dilihat dari capaian kinerja, diantaranya pada bidang perikanan, produksi perikanan mencapai 2.825 ton, 61% lebih tinggi dari yang ditargetkan daerah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Grobogan sebesar 14,49 kg/kapita/tahun, 7% lebih tinggi dari yang ditargetkan daerah.

Di bidang pertanian, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mencapai 5,79 Ton per Hektar, meningkat 0,62 Ton per Hektar dibanding tahun lalu. Bidang perdagangan, nilai ekspor sebesar Rp. 142.032.319.000,-. Bidang industri, pertumbuhan jumlah industri sebesar 1,28%, meningkat 0,33% dibanding tahun lalu.

Adapun penyelenggaraan Urusan yang mendukung prioritas ini adalah Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Perdagangan

serta Urusan Perindustrian, dengan total anggaran sebesar Rp. 28.302.195.300,- terealisasi sebesar 93,71%.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, melalui 5 (lima) Kementerian, yang meliputi: Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan total anggaran sebesar Rp.36.616.857.000,- dan terserap sebesar Rp.35.463.532.029,- atau 96,85%, dengan perincian sebagai berikut :

- A. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan, dengan anggaran Rp. 3.726.723.000,- terealisasi 96,21%, untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan bagi 30 Puskesmas.
- B. Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri, dengan anggaran Rp. 2.903.754.000,- terealisasi 86,10%, digunakan untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Program Bina Pembangunan Daerah.
- C. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran Rp. 2.500.000.000,- terealisasi 82,89%, digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan di 6 lokasi.
- D. Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp.27.206.265.000,- terealisasi 99,34%, digunakan untuk Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, serta Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan.
- E. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggaran Rp. 280.115.000,- terealisasi 100% digunakan untuk Pembuatan bibit kehutanan sebanyak 200.000 batang pada 20 kelompok tani.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015, antara lain sebagai berikut :

- A. Kerja sama antar daerah, berupa kerja sama regional Kedungsepur yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Demak, Grobogan, Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga, kerja sama penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- B. Kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Purwodadi, Komandan Distrik Militer 0717/Purwodadi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional VI Jawa Tengah dan DIY, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwodadi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan lain-lain.
- C. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Instansi Vertikal, dalam rangka mencapai keterpaduan, keselarasan, kesamaan langkah dan keharmonisan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- D. Terkait dengan pembinaan batas wilayah, pada tahun 2015 Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Pati dan Blora, yaitu Permendagri Nomor 31 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Dengan terbitnya Permendagri ini maka keseluruhan batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan kabupaten tetangga telah disahkan.
- E. Dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi

pemetaan potensi bencana alam, penyediaan bahan bantuan bencana alam, melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, bantuan air bersih, pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir, rehabilitasi hutan dan lain-lain.

F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan unsur masyarakat.

G. Hal Lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2015, sebagai berikut :



1. Penghargaan Nasional Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan;
 2. Juara I Nasional Lomba Website Tingkat Kementerian Pertanian;
 3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional a.n. SMP 3 Gubug;
 4. Juara I Tingkat Nasional lomba Petugas Inseminasi Buatan (Inseminator) a.n. Budi Tri Widodo;
 5. Juara II Tingkat Nasional lomba Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) a.n. UPP Mitra Usaha Mina;
 6. Juara II Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Padi a.n. Kelompok Tani "Sumber Urip" Desa Pulutan Kecamatan Penawangan;
 7. Juara II Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Jagung a.n. Kelompok Tani "Makaryo" Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi;
 8. Juara III Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Kedelai a.n. Kelompok Tani "Wargo Asih" Desa Pojok Kecamatan Pulokulon;
- serta masih banyak penghargaan lainnya dari tingkat provinsi.

VII. PENUTUP

Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Grobogan, yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan daerah, serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Grobogan dalam keadaan baik dan kondusif.

Selanjutnya kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama masa kepemimpinan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Grobogan belum sepenuhnya dapat

memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini saya selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan masukan yang konstruktif guna peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridloi usaha kita semua. Amin.

**Purwodadi, 12 Maret 2016**
BUPATI GROBOGAN

H. BAMBANG PUDJIONO, SH